

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 3, Agustus 2026

PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP KETERBUKAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

Wie Shi Wudjud ^{1*)}; Sahala Purba ²⁾

1). Fakultas Ekonomi, STIE PMCI, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

wieshiwudjud1w@gmail.com

2). Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

Sahala824@gmail.com

*Corresponding email: wieshiwudjud1w@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of E-Government Implementation on Village Government Financial Disclosure in Alasa District, North Nias Regency. This type of research is quantitative research using primary data. The population in this study were all village officials in villages in Alasa District with sample determination using a purposive sampling method totaling 75 respondents. The time of this study was conducted for 5 months, namely November 2025 to March 2026. The data analysis technique used in this study was descriptive statistics. Primary data quality testing was carried out by researchers by conducting validity and reliability tests, classical assumption tests, simple linear regression tests and hypothesis tests using the SPSS 26 application. The results of this study indicate that the Effect of E-Government Implementation has a positive and significant effect on Village Government Financial Disclosure. The implications of this study indicate that optimizing the implementation of digital systems in village government can increase public information disclosure and strengthen the transparency of village government management.

Keyword: E-Government Implementation, Village Government Transparency

PENDAHULUAN

Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Keterbukaan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka, akurat, dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa masih menghadapi berbagai kendala. Data Kemendes PDTT (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% masyarakat desa yang merasa puas terhadap keterbukaan informasi pemerintah desa. Selain itu, laporan Ombudsman RI mencatat masih banyak pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan maladministrasi dan rendahnya keterbukaan informasi publik.

Adapun contoh kasus kecurangan dalam keterbukaan dalam pemerintahan desa yang terjadi seperti di Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dimana Kepala Desa dan Bendaharanya tersangka dan ditahan pada 28 April 2025 atas penyalahgunaan anggaran desa tahun 2018-2022 sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,6 miliar. Hasil audit Inspektorat dan Penyidikan Kejari Labuhanbatu menunjukkan adanya penyelewengan anggaran dan laporan fiktif, yang menyebabkan penggeledahan kantor desa maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta penyitaan sekitar 400 dokumen sebagai barang bukti (Rahmat Utomo, 2025).

Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara terdiri dari 14 desa dengan status pembangunan yang bervariasi berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2024. Meskipun sebagian desatelah berstatus maju dan mandiri, peningkatan status pembangunan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan aspek Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa.

Pra-survei menunjukkan bahwa Penerapan e-government di beberapa desa belum optimal karena; Infrastruktur jaringan internet belum memadai, gangguan jaringan sering terjadi, keterbatasan anggaran, dan SDM belum memiliki kompetensi teknologi yang memadai.

Penerapan e-government merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan keterbukaan, efisiensi pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Melalui sistem digital, pelayanan seperti administrasi kependudukan dan penyediaan informasi publik dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur kebijakan ini melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan E-Government.

Terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya; Peneliti [(Siahaan et al., 2025); (Dwibin Kannapadang et al., 2025); (Adnan et al., 2024)] yang menyatakan bahwa e-government berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa. Sedangkan peneliti (Shaula & Orientia, 2023) menyatakan bahwa e-government tidak berpengaruh terhadap Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa.

Adapun Rumusan penelitian adalah “Apakah E-Government dapat berpengaruh terhadap keterbukaan keuangan Pemerintahan Desa pada desa di Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara?”

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan suatu keadaan dimana manajemen lebih berfokus pada kepentingan bersama atau kepentingan organisasi dan tidak termotivasi oleh tujuan individu, dalam antrian terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (James H.Davis & Schoorman, 1997). Teori ini melihat manajemen organisasi sebagai *steward* yang akan bertindak dengan penuh kesadaran, jujur dan bijaksana untuk kepentingan organisasi.

Penggunaan *Stewardship Theory* dalam penelitian ini memposisikan pemerintah desa sebagai *steward* dan masyarakat desa sebagai *principal*. Dalam konteks pemerintahan desa, pemerintah desa bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya dan menyediakan pelayanan publik secara bertanggung jawab. Sebagai *steward*, pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga wajib membuka akses informasi, mengelola keuangan desa secara transparan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memastikan adanya keselarasan tujuan antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, keterbukaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah desa dalam memenuhi tujuan kolektif, yakni tercapainya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa

Menurut peneliti (Siahaan et al., 2025) keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi penting bagi masyarakat melalui media digital seperti SID, sehingga warga bisa melihat dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah. Peneliti (Shaula & Orientia, 2023) berpendapat bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi pemerintah khususnya keuangan dan pelayanan publik secara jelas, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (UU No. 28 Tahun 1999).

Menurut (Wizrotul, 2023) bahwa yang menjadi indikator untuk dapat membangun transparansi pemerintahan desa adalah :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Keterbukaan proses
3. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
4. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Penerapan *E-Government*

Penerapan *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan keterbukaan, efektivitas, dan akuntabilitas (Adnan et al., 2024). Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003, tujuan *e-government* adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik & mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan efisien.

Penerapan *e-government* diukur menggunakan 5 dimensi (Kosali, 2021):

1. *Accessibility* – Kemudahan akses layanan digital
2. *Availability* – Ketersediaan layanan setiap waktu
3. *Security & Accountability* – Keamanan data dan pertanggungjawaban
4. *Integrability* – Keterhubungan sistem informasi
5. *Sustainability* – Keberlanjutan sistem

Hipotesis Penelitian

Teori *Stewardship* menempatkan aparat pemerintah desa sebagai *steward* yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik dan menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat desa sebagai *principal*. Pemanfaatan *e-government* melalui penyediaan informasi digital, layanan administrasi *online*, dan sistem pelaporan elektronik mendukung peran *steward* dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penerapan *e-government* memungkinkan setiap proses pemerintahan terdokumentasi, dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Menurut ahli (Heeks, 2005) *e-government* memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterbukaan pemerintahan melalui digitalisasi proses layanan publik. Richard Heeks menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap data, kebijakan, dan aktivitas pemerintahan. Digitalisasi ini mengurangi peluang manipulasi, mempersempit ruang birokrasi tertutup, dan meningkatkan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, keberhasilan Penerapan *e-government* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas sistem informasi yang digunakan.

Berdasarkan teori *Stewardship*, konsep *e-government* menurut ahli (Heeks, 2005) serta temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Penerapan *E-Government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang disusun secara sistematis, terarah, dan memiliki struktur yang jelas dari tahap awal hingga pengembangan desain penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang melibatkan penggunaan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen standar, dan analisis data secara numerik atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diformulasikan sebelumnya.

Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan objek penelitian dalam keadaan saat ini berdasarkan fakta yang ada, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam bentuk studi pengembangan (Sujarweni, 2017).

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan meliputi pejabat desa di desa-desa yang berada di Distrik Alasa, yang terdiri dari 14 desa. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Penelitian ini menggunakan metode sampling purposif, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Sekretaris desa yang berfungsi sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
2. Kepala seksi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
3. Satu orang mewakili kepala urusan yang turut menjalankan fungsi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
4. Satu orang mewakili kepala dusun yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Masing-masing telah menjabat minimal 2 tahun.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana, yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Analisis ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* untuk memudahkan proses pengolahan data, perhitungan, dan interpretasi secara sistematis dan akurat.

Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik data penelitian melalui nilai rata-rata, median, modus, minimum, maksimum, dan simpangan baku. Statistik deskriptif berfokus pada proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi variabel yang diteliti tanpa menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih luas.

Uji Kualitas Data

Uji data dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai, karena akurasi data yang diperoleh akan sangat mempengaruhi kualitas dan kredibilitas hasil penelitian.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian, khususnya kuesioner, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah kuesioner

dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan yang terkandung di dalamnya mampu secara akurat mengungkap variabel-variabel yang akan diukur (Ghozali, 2018). Adapun kriteria pengambilan keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$), maka setiap butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan valid atau sah.
2. Jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$), maka setiap butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan tidak valid atau tidak sah.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana alat ukur dapat diandalkan dan menghasilkan hasil yang konsisten. Menurut (Ghozali, 2018) keandalan berfungsi sebagai indikator dari variabel atau konstruk yang sedang diteliti. Oleh karena itu, sebuah kuesioner dianggap andal jika jawaban yang diberikan oleh individu terhadap setiap item pertanyaan menunjukkan stabilitas sepanjang waktu.

Adapun kriteria penentuan reliabilitas didasarkan pada nilai Cronbach's Alpha, yaitu:

1. Apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70 maka instrumen dinyatakan reliabel atau konsisten.
2. Apabila nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,70 maka instrumen dianggap tidak reliabel atau tidak konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara valid. Dalam studi ini, uji asumsi klasik dilakukan pada data primer yang mencakup dua jenis uji utama, yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data dalam model regresi, baik pada variabel independen maupun dependen, memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal, karena ini merupakan salah satu prasyarat utama dalam analisis regresi linier. Untuk menguji normalitas residu, digunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* yang tersedia dalam program SPSS. Keputusan uji didasarkan pada nilai signifikansi (*Asymp.Sig.*) dibandingkan dengan tingkat signifikansi α , misalnya 0,05.

Jika *Asymp.Sig.* $> \alpha$, maka hipotesis nol (H_0) diterima, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika *Asymp.Sig.* $< \alpha$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Selain itu, normalitas juga dapat dievaluasi melalui *Normal Probability Plot (P-P Plot)*, yang memberikan representasi visual dari distribusi data. Sebuah model regresi dikatakan berdistribusi normal jika titik-titik data pada grafik *P-P Plot* tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakmerataan dalam varians dan residu antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Menurut (Ghozali, 2018), model regresi yang baik seharusnya menunjukkan homoskedastisitas, yaitu varians residu yang sama pada setiap tingkat variabel independen.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji dan menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018), analisis regresi sederhana bertujuan untuk menentukan arah dan besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, baik positif maupun negatif. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen berdasarkan variasi yang terjadi pada variabel independen. Model regresi linier sederhana dalam studi ini diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Y = Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa (Desa di Kecamatan Alasa)

X = Penerapan *E-Government*

α = Bilangan Konstanta

β = Bilangan Koefisien

e = Error yang ditolerir

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) dan Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parsial).

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*R²*) digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen oleh variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018), nilai *R²* menggambarkan proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Semakin tinggi nilai *R²*, semakin besar kemampuan model untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Untuk mempermudah interpretasi, indikator *Adjusted R²* dapat dikategorikan dalam bentuk interval (Ghozali, 2018), sebagai berikut:

1. Jika *R²* = 0.00-0.19, maka pengaruh sangat rendah
2. Jika *R²* = 0.20-0.39, maka pengaruh rendah
3. Jika *R²* = 0.40-0.59, maka pengaruh sedang
4. Jika *R²* = 0.60-0.79, maka pengaruh kuat
5. Jika *R²* = 0.80-1.00, maka pengaruh sangat kuat

Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh individu dari variabel independen terhadap variabel tergantung (Ghozali, 2018). Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $y < 0,05$, dan ditolak jika $y > 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ciri-ciri Responden

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang (56,00%) dan perempuan sebanyak 33 orang (44,00%).

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat pemerintah desa adalah lulusan SMP (2,67%), SMA (56,00%), S1 (41,33%), dan diikuti oleh lulusan S2 (0%). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia pemerintah desa sudah memiliki kapasitas yang baik dalam hal pendidikan dan diharapkan dapat mengelola Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa dengan baik

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas, perhitungan atau pengukuran validitas kuesioner penelitian diperoleh seluruh pernyataan dalam variabel pengaruh Penerapan *e-government* (X), dan Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa (Y) dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif, atau nilai *Pearsons Correlation* $> 0,05$. Hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam variabel lebih besar dari r_{tabel} 0.2272 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Sementara itu, berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai variabel Penerapan *e-government* adalah 0,782, dan nilai variabel Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa adalah 0,805. Dengan demikian, semua variabel dinyatakan dapat diandalkan dan dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3 menunjukkan hasil uji asumsi klasik untuk model regresi. Data residu terdistribusi secara normal dengan tingkat signifikansi uji KS satu sampel sebesar $0,342 > 0,05$. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat bentuk pola tertentu karena titik-titik menyebar diatas dan juga dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 1. Ciri-ciri Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	42 orang	56,00
Perempuan	33 orang	44,00
Total	75 orang	100

Sumber: Data Peneliti, 2026

Tabel 2. Ciri-Ciri Responden Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMP	2 orang	2,67
SMA	42 orang	56,00
S1	31 orang	31,33
S2	0 orang	0
Total	75 orang	100

Sumber: Data Peneliti, 2026

Uji Hipotesis

Hasil uji penentuan nilai *R Square* sebesar 0,216 (21,6%) menunjukkan bahwa Penerapan *E-Government* hanya mampu menjelaskan 21,6% variasi Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa, sedangkan 78,4% dipengaruhi faktor lain di luar model. Adapun faktor penyebabnya karena penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) variabel independen yaitu *E-Government*, sedangkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti Pengawasan BPD, partisipasi masyarakat, Kompetensi Aparat Pemerintah Desa yang dapat memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap dependennya. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya memperbanyak variabel independennya dalam memperkuat keterbukaan keuangan pemerintahan desa. Mengacu pada kriteria Ghazali (2018), nilai 0,216 termasuk kategori rendah, sehingga kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen tergolong rendah. Pada tabel 4 berdasarkan uji t, Penerapan

E-Government memiliki nilai signifikansi $0,03 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2,978 > t_{tabel} 1,993$ dengan koefisien regresi 0,297. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan *E-Government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa, sehingga hipotesis diterima.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Sig	Heteroskedastisitas
Pengaruh Penerapan E-Government		0,507
Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa		0,447
Uji K-S Satu Sampel	0,342	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2026

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig	Hypothesis
(Constant)	13,355	3.940	1.993	.005	
Pengaruh Penerapan <i>E-Government</i>	.258	2.978	1.993	.003	Diterima
R Square			.216		

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2026

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-Government* terhadap Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Penerapan *e-government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik penerapan sistem digital dalam pemerintahan desa, maka semakin meningkat pula keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini secara empiris mendukung hipotesis yang diajukan bahwa Penerapan *e-government* mampu meningkatkan Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan pra survey, mengenai Penerapan *e-government* di kecamatan Alasa sudah tepat, sehingga mempercepat pelayanan masyarakat desa, dan keamanan data desa terjamin kerahasiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas *e-government* sangat dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi informasi, namun masih memerlukan kompetensi sumber daya manusia untuk memaksimalkan peng-Penerapanan *e-government* pada desa-desa di kecamatan Alasa untuk memaksimalkan keterbukaan informasi pada pemerintahan desa.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Siahaan et al., 2025), Dwibin Kannapadang et al. (2025), dan Adnan et al. (2024) yang menyatakan bahwa Penerapan *e-government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkuat bukti empiris bahwa penerapan teknologi informasi dalam tata kelola desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Secara keseluruhan, seluruh temuan penelitian ini konsisten dan saling mendukung bahwa Penerapan *e-government* memiliki pengaruh nyata dalam meningkatkan Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa di Kecamatan Alasa, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mengoptimalkan dampaknya.

Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai Pengaruh Penerapan *E-Government* terhadap Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa di Kecamatan Alasa dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan *E-Government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Keuangan Pemerintahan Desa.

REFERENSI

- Adnan, I. Z., Adnan, Z., Fadhlurrohman, M. I., Shiddiq, H., & Fauzan. (2024). Implementation of e-Government through System Village Information (SID) (Case Study of Talaga Jaya Village, Garut Regency). *Sinergi International Journal of Communication Sciences*, 2(2), 106–121. <https://doi.org/10.61194/ijcs.v2i2.296>
- Angganten, T. A. (2024). Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tapak Kabupaten Magetan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194.
- Dwibin Kannapadang, Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing E-Government for Enhanced Transparency and Accountability in Local Governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 4203–4212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3962>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heeks, R. (2005). E-Government as a Carrier of Context. *Journal of Public Policy*, 25(1), 51–74. <https://doi.org/10.1017/S0143814X05000206>
- James H.Davis, & Schoorman, F. D. (1997). TOWARD A STEWARDSHIP THEORY OF MANAGEMENT. In *Academy of Management Review* (Vol. 22, Issue 1).
- Kosali, A. Y. (2021). Pengaruh Implementasi Electronic Government (E-Government) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10, 1–21.
- Rahmat Utomo, E. E. J. (2025). *Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 1,6 Miliar, Mantan Kades dan Bendahara di Labuhan Batu Ditahan*. Kompas.Com/ Regional.
- Shaula, & Orientia, F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Gaya Kepemimpinan, Dan E-Government Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah. *Diss. Universitas Islam Indonesia*.
- Siahaan, R. M., Yuniarti, Y., & Hendriyaldi. (2025). Kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan dalam Penerapan E- Government untuk Meningkatkan Transparansi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital. *Ebisnis Manajemen*, 3(3).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wizrotul, A. A. (2023). Model Transparansi Anggaran Desa di Yogyakarta. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 35–42. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v6i2.14168>